

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA LHOEKSEUMAWE

Nurfajri dan Faisal
Jurusan Ekonomi Pembangunan
STIE Lhokseumawe

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap belanja Daerah Di Kota Lhokseumawe. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (*time series*) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel Data dalam penelitian ini berbentuk data tahunan selama 8 tahun (2006-2013). Analisa data dengan menggunakan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial maupun simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah Di Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci : PAD, DAU dan Belanja Daerah

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu pemerintah pusat tetap

memberi dana bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah daerah. Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" diperhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Maemunah, 2006).

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*.

Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah di kota Lhokseumawe.
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah di kota Lhokseumawe.
3. Apakah pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah di kota Lhokseumawe

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap belanja daerah di kota Lhokseumawe

2. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah di kota Lhokseumawe
3. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja daerah di Kota Lhokseumawe.

D. TEORI

1. Pengertian Anggaran dan APBD

Menurut Djayasinga (2007) dalam Nurul (2008), APBD didefinisikan sebagai berikut:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah Daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk

membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting didalam penyelenggaraan pemerintah (Arif, 2002). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

2. Alokasi Anggaran Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penerimaannya berada dilembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada ditangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007).

Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok (Pambudi, 2007), yaitu:

a. Belanja Administrasi Umum

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik.

Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja operasi

Pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
2. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana

- dan prasarana publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan publik.
3. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja modal

Merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
 2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.
- d. Belanja transfer
- Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya

harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

- a. Angsuran Pinjaman
- b. Dana Bantuan
- c. Dana Cadangan
- e. Belanja tak terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Menurut Nurlan (2008) menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber asli ekonomi daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana yang sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara

meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2002):

1. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

4. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari

penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Dana alokasi umum adalah adana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Bambang Prakoso, 2004).

E. Hipotesis Penelitian

- H1 : Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Lhokseumawe.
- H2 : Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja daerah di Kota Lhokseumawe

H3 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja daerah di Kota Lhokseumawe

F. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kota Lhokseumawe periode 2006-2013. Sampel ditetapkan dengan metode sensus. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan PAD dan DAU periode 2006-2013.

1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1) Variabel Dependen

Belanja Daerah (Y)

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran kota Lhokseumawe dari tahun 2006 sampai dengan 2013.

2) Variabel Independen

1. Pendapatan Asli Daerah
Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba

Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah kota Lhokseumawe dari tahun 2006 sampai dengan 2013.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah kota Lhokseumawe.

2. Rancangan Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda. Criteria pengujian hipotesis sebagai berikut:

- $H_{01}: \beta_1 ; \beta_2 = 0$; Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
- $H_{a1} : \beta_1 ; \beta_2 \neq 0$; Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama tidak

berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

hipotesis berdasarkan regresi, pengujian hipotesis tersebut dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengaruh masing-masing variabel untuk regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel.

G. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis untuk menguji dan menganalisis rumusan

Tabel Hasil analisis regresi linear berganda

Nama Variabel	B	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig
Konstanta	1,196E11	2,259	2.30600	0,073
PAD	-0,210	-0,040	2.30600	0,970
DAU	1,168	3,429	2.30600	0,019
Koefisien Korelasi (R)	= 0,971	a. Predictors : (Constant) PAD, DAU b. Dependent Variabel : Belanja Daerah		
Koefisien Determinasi (R ²)	= 0,943			
R Adjusted Square	= 0,920			

2. Pembahasan

1. Pengaruh secara bersama-sama
 Hasil uji SPSS menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 41,284 dengan probabilitas 0,001. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja daerah. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Variabel PAD (X₁) terhadap Belanja Daerah (Y) mempunyai nilai

t_{hitung} sebesar -0,040 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,30600. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa t_{hitung} < t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,970 atau dengan kata lain pengujian hipotesis ini menolak H₁ dan menerima H₀. Ini berarti variabel PAD (X₁) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Variabel DAU (X₂) terhadap Belanja Daerah (Y) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 3,429 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,30600. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa t_{hitung} > t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,19 atau dengan kata lain pengujian hipotesis ini menerima H₁ dan

menolak H_0 . Ini berarti variabel DAU (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

H. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

2. Saran

1. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun extensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin.
2. Penelitian di bidang serupa hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan variabel yang digunakan juga diharapkan agar lebih lengkap seperti menambah variabel ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi

I. Daftar Pustaka

- Arif, Bahtiar. 2002. Akuntansi pemerintah. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Boediono, koster, A. 2004. Teori dan Aplikasi: Statistika dan Probabilitas. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Makalah disajikan pada Seminar AntarBangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba 4: Jakarta.
- Maimunah, Mutiara. (2006). Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan

- Daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Sukriy dan Halim Abdullah (c), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Triwidodo, Pambudi. 2007. Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada kabupaten/Kota di Bali. Skripsi sarjana (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

